



# TIPOLOGI PERMUKIMAN DI INDONESIA: PENJEJANGAN, DIKOTOMI, KONTEKS SOSIAL, DAN SPASIAL

Gun Faisal<sup>1,2</sup>, Ikaputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Arsitektur, Universitas Riau

<sup>2</sup>Program Doktor Arsitektur, Departemen Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada

Penulis korespondensi: Gun Faisal, [gunfaisal@eng.unri.ac.id](mailto:gunfaisal@eng.unri.ac.id)

Naskah diajukan pada: 10 Januari 2022

Naskah revisi akhir diterima pada: 22 Agustus 2022

## Abstrak

Jenjang permukiman di Indonesia memiliki keberagaman yang mengacu kepada istilah lokal. Generalisasi terjadi ketika sebuah organisasi yang disebut negara berdiri dengan undang-undang yang mengatur penamaan hierarki tersebut. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana teori hierarki permukiman secara umum dalam konteks global menjadi dasar dalam pengelompokan jenjang permukiman yang ada di Indonesia. *Mixed-methods systematic review* digunakan sebagai metodologi penelitian, dengan mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian yang berfokus pada hierarki permukiman. Diawali dengan menetapkan tujuan penelitian beserta tipe *evidence*; dilanjutkan dengan pencarian literatur berdasarkan kategori yang ditetapkan; Selanjutnya penilaian studi; dan mengelompokkan temuan tersebut; dan diakhiri dengan menetapkan dan menyimpulkan temuan sebagai konteks atau hasil ulasan. Hasil penelitian ini berupa pen-tipe-an hierarki permukiman tradisional yaitu; Tipe pertama disebut *kelompok pertanian*, kelompok ini terbentuk dalam konteks kegiatan bertahan hidup dengan keluarga inti; Tipe kedua disebut *kelompok bermukim*; sebagai upaya menjaga tradisi dan kebudayaan dalam satu kekerabatan; Tipe ketiga berupa *kumpulan kelompok bermukim (kelompok suku)* yang berdasarkan pada satu garis keturunan yang lebih jauh; Tipe keempat disebut *kumpulan kelompok suku (kelompok adat)*, kumpulan dari kampung atau persukuan tadi membentuk hierarki yang lebih tinggi; Sedangkan Tipe berikutnya di atas kampung jenjang tersebut mulai samar, karena tidak banyak daerah yang memiliki hierarki yang di atas kampung.

Kata-kata Kunci: Hierarki Permukiman, Pedesaan, Perkotaan, Permukiman Tradisional, Tipologi

## TYPOLOGY OF SETTLEMENT IN INDONESIA: HIERARCHY, DICHOTOMY, SOCIAL CONTEXT, AND SPATIAL

### Abstract

*The hierarchy of settlement in Indonesia has a diversity that refers to local terms. Generalization occurs when an organization called a state exists with laws governing the establishment of the hierarchy. This paper tries to see how the general settlement hierarchy theory in a global context becomes the basis for classifying settlement levels in Indonesia. The mixed-methods systematic review is used as a research methodology by collecting and evaluating research focusing on settlement hierarchies. Beginning with determining the research objectives along with the type of evidence; followed by a literature search based on the defined category; Further assessment studies; grouping the findings, and ending by establishing and concluding the findings as to the context or results of the*

*review. The results of this study are in the form of typing the traditional settlement hierarchy; namely, the first type is called the agricultural group. This group is formed in the context of survival activities with the nuclear family. The second type is called a resident group as an effort to maintain tradition and culture in one kinship. The third type is a collection of settled groups (tribal groups) based on a more distant lineage. The fourth type is called a collection of tribal groups (customary groups), where the collection of villages or tribes forms a higher hierarchy. The next type above the village level is starting to be vague because not many areas have an order above the village.*

*Keywords: Settlement Hierarchy, Rural, Urban, Traditional Settlement, Typology.*

---

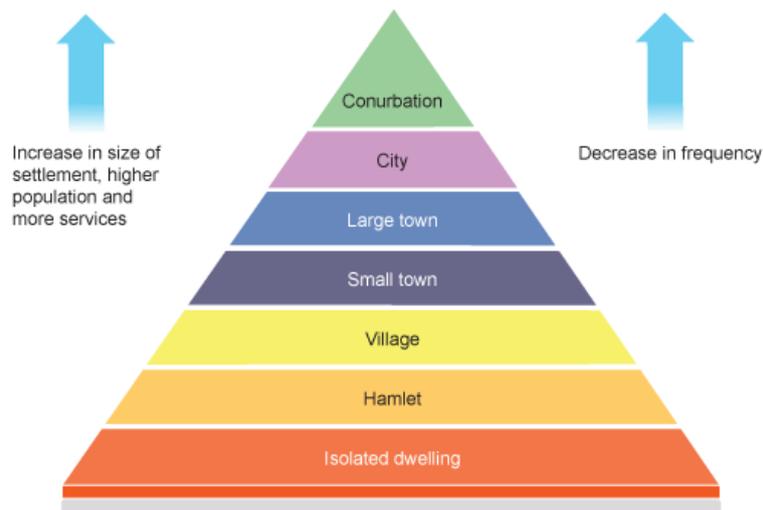
## 1. Pendahuluan

Permukiman di Indonesia memiliki tatanan dan jenjang yang sangat beragam, penamaan jenjang (hierarki) tersebut mengacu kepada istilah lokal di masing-masing permukiman yang ada. Jenjang permukiman terkecil berada pada kontestasi hunian tinggal yang kemudian berkelompok dan membentuk tatanan tersendiri, kelompok-kelompok ini juga terus berkembang dengan adanya pemangku yang membawahi wilayah-wilayah tersebut. Živkovi (2019) mengatakan bahwa permukiman manusia merupakan tempat tinggal manusia berdasarkan pada totalitas komunitas dengan semua elemen sosial, material, organisasi, spiritual, dan budaya yang menopangnya. PBB menyebutkan bahwa sebuah permukiman dalam arti kelompok populasi, tersebar di beberapa wilayah administrasi dengan satu wilayah administrasi tersebut dapat berisi beberapa permukiman (Dijkstra *et al.*, 2021). Selanjutnya permukiman dijelaskan sebagai tempat bermukim yang terbentuk berdasarkan ikatan sosial, budaya, religi serta kegiatan ekonomi (Muslim *et al.*, 2017).

Istilah hierarki permukiman digunakan oleh Brian Roberts pada tahun 1972 yang diartikan sebagai cara mengatur, mengelompokkan atau mengklasifikasikan pemukiman berdasarkan populasi (ukuran) serta beberapa kriteria (bentuk) lainnya (Heat, 2021; BBC, 2021). Sebelumnya Doxiadis (1968) mengatakan bahwa permukiman idealnya diurutkan dari yang memiliki jumlah populasi dan area terbesar. Kemudian hal ini berkembang menjadi teori *Ekistics* yang menjelaskan pemukiman (*human settlement*). Terdapat lima elemen dasar permukiman yang dirumuskan oleh Doxiadis yaitu; *Nature* (alam), *Man* (manusia), *Society* (Masyarakat), *Shells* (rumah) dan *Networks* (jaringan) (Doxiadis, 1970; Santoso & Therik, 2016; Farizkha *et al.*, 2019). Secara umum pembagian jenjang permukiman tersebut berdasarkan kriteria yang telah disusun menjadi sebuah piramida hierarki yang sekarang digunakan. Sedangkan dalam konsep sistem perkotaan Brian J.L. Berry pada tahun 1964 menyebutkan hierarki permukiman perkotaan disusun secara vertikal berdasarkan jumlah penduduk dengan kriteria berdasarkan; ukuran populasi, fungsi yang dilakukan, serta lingkup pengaruh.

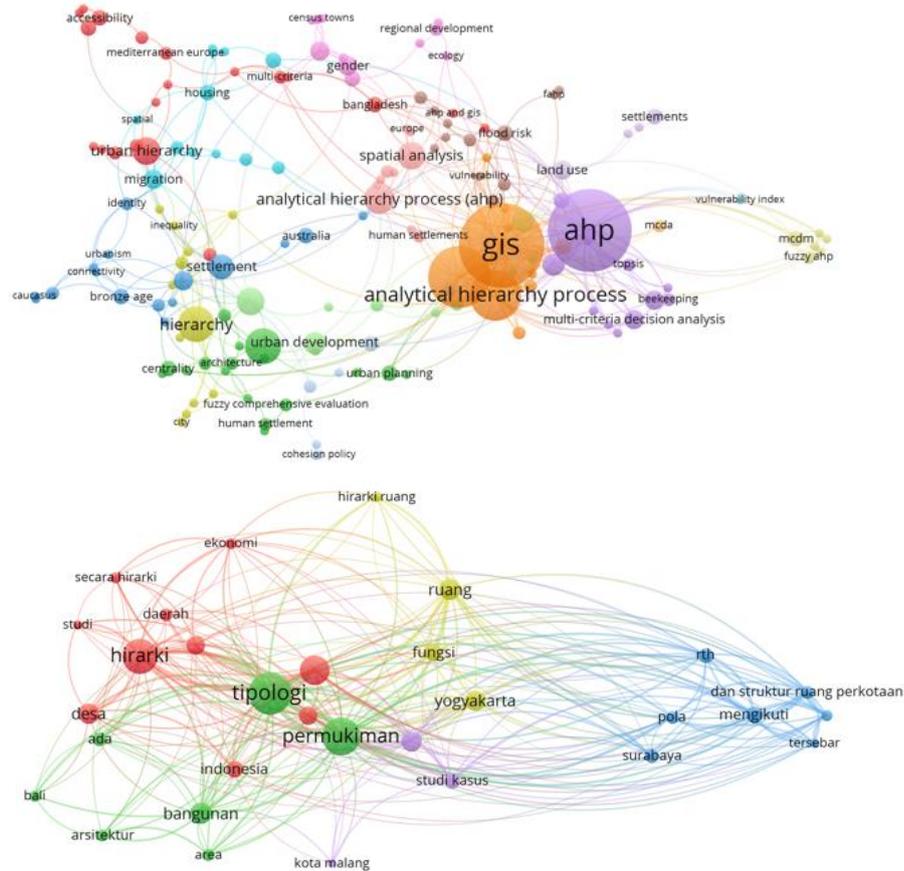
Hal ini tentunya berbeda dengan penjenjangan maupun struktur kebudayaan dan istilah lokal yang ada di Indonesia. Permukiman tradisional di Indonesia memiliki beragam hierarki yang mungkin secara umum sama dan berbeda antara satu tempat dengan lainnya. Generalisasi terjadi ketika sebuah organisasi yang disebut negara berdiri dengan undang-undang yang mengatur penamaan hierarki tersebut. Undang-undang mengatur secara gamblang bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia mulai dari level terkecil hingga sampai ke pemerintahan Provinsi, pembagian administratif Indonesia berdasarkan prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Permukiman tradisional dapat artikan berupa tempat yang sepenuhnya dibentuk oleh budaya suatu masyarakat (Oktay & Dincyurek, 2008). Mengutip apa yang dikatakan Crysler, Sasongko (2005) menyebutkan permukiman tradisional sebagai tempat yang masih memegang erat nilai-nilai adat dan budaya (Fairuzahira *et al.*, 2020; Tobing & Sakti, 2021). Permukiman Tradisional diartikan sebagai lingkungan tempat hunian yang dibangun maupun diatur berdasarkan norma adat dalam berkehidupan serta difungsikan melalui cara yang sama dari generasi ke generasi (Amabi & Dima, 2020).

Hierarki permukiman tersebut dapat ditipologikan berdasarkan demografi penduduk, karakter wilayah secara spasial, maupun pemangku kebijakannya dalam konteks sosial dan kebudayaan. Dalam tulisannya Antoine Quatremère de Quincy pada tahun 1982 menyebutkan kata tipologi dalam arsitektur sebagai ilmu atau kajian tentang tipe (Barliana, 2004; Pineiro, 2021; Prajnowrdhi & Yudiantini, 2017). Tipologi diartikan sebagai bidang pengetahuan yang berfokus pada identifikasi tipe dan karakteristik, serta melakukan pengelompokan dan pengklasifikasian (*taksonomi*) (Faisal *et al.*, 2014). Secara umum tipologi dikatakan sebagai ilmu dalam *men-tipe-kan* atau mengelompokkan dan disebut sebagai upaya menghasilkan tipe sama dalam klasifikasi dan kategori objek yang diamati berdasarkan kesamaan karakter bentuk dasarnya (Moneo, 1978; Francescato, 1994). Tipologi dalam konteks arsitektur merupakan klasifikasi atau pengelompokan karya arsitektur berdasarkan ciri-ciri tertentu. Sedangkan tipologi istilah merupakan kaitannya dengan cara mentipekan atau mengelompokkan suatu istilah atau bahasa yang sama berdasarkan teori yang melatarbelakanginya.



**Gambar 1.** Piramida Hirarki Pemukiman  
Sumber: Steven Heath, 2021

Studi tipologi maupun studi tentang permukiman sudah sangat banyak dilakukan, baik dalam mentipekan bentuk dan ruang, maupun kajian tentang tipologi permukiman tradisional. Dalam proses mengklasifikasikan atau pentipean tersebut tentunya perlu melihat sesuatu yang berbeda, agar keaslian penelitian ini dapat dicapai. Kita lihat apa yang disampaikan Hardi *et al.* (2021) dalam tulisannya disebutkan terdapat 19 penelitian mengenai tipologi dan perumahan. Dalam menemukan gap analisis digunakan *software* VOSviewer. VOSviewer merupakan teknik pemetaan yang dikemukakan oleh Van Eck dan Waltman (2014) berdasarkan visualisasi jaringan *bibliometric* dengan melihat statistik analisis dari buku, artikel, dan publikasi lainnya untuk melihat sejauh mana penelitian tentang tipologi hierarki permukiman yang ada. *Database* yang diambil merupakan dari pengindeksan *GoogleScholar* 5 tahun terakhir, dengan kata kunci “tipologi hierarki permukiman”. Dari hasil pencarian ditemukan 763 artikel tentang penelitian dengan kata kunci tersebut. Selain database tersebut juga digunakan database dari pengindeks *Scopus* dengan kata kunci *settlement hierarchy* ditemukan 473 dokumen dari rentang waktu 2017-2021. Sehingga berdasarkan database tersebut muncul visualisasi jaringan *bibliometric*, yang pada akhirnya penelitian ini dapat dijustifikasi belum pernah dilakukan dengan melihat gambar gap analisis yang ada.



**Gambar 2.** Jaringan Bibliometrik dari Pengindeks Scopus (atas) dan Google Scholar (bawah)  
 Sumber: Analisa Menggunakan VOSviewer, 2021

Tulisan ini mencoba melihat bagaimana teori hierarki permukiman secara umum dalam konteks global, kemudian menjadi dasar bagaimana merumuskan pengelompokan jenjang permukiman yang ada di Indonesia. Hierarki tersebut kemudian diturunkan ke dalam jenjang yang dipakai secara umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjenjangan tersebut tulisan ini akan membahas bagaimana hierarki yang ada dalam permukiman tradisional dalam istilah lokal tersebut dapat disusun dimulai dari komunitas terkecil sampai komunitas yang lebih besar di Indonesia. Pada akhirnya penelitian ini akan membantu suatu deskripsi mengenai istilah penjenjangan permukiman yang berdasarkan keberagaman *local wisdom* yang ada di Indonesia.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan *mixed-methods systematic review* sebagai dasar penelitian. *Systematic Review* diartikan sebagai sebuah metodologi penelitian dalam mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang berfokus pada topik tertentu (Triandini *et al.*, 2019; Lusiana & Suryani, 2014). Metode ini digunakan dalam mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang ada berdasarkan pada topik fenomena dan pertanyaan penelitian yang relevan untuk menghasilkan bukti dalam menghasilkan keputusan kajian (Wang *et al.*, 2011; Pearson *et al.*, 2015; Skirton *et al.*, 2012). Langkah dalam *systematic review* dimulai dari (1) mendefinisikan tujuan penelitian dengan menetapkan tipe *evidence*; (2) kemudian dengan pencarian literatur dengan kategori yang ditetapkan; dilanjutkan dengan (3) penilaian studi; serta (4) menggabungkan hasil temuan dengan mengelompokkan temuan tersebut; dan diakhiri dengan (5) menetapkan hasil dengan menyimpulkan konteks atau hasil *review* atau ulasan (Hariyati, 2010).

Metode penelitian ini dilakukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan ilmu pengetahuan di tengah kondisi pandemi. Upaya penelitian lapangan yang terbatas sebagai upaya menjaga penularan virus perlu disiasati dengan metode yang memungkinkan tetap bisa dilakukan tanpa harus mengambil data di lapangan. Langkah penelitian dimulai dari menentukan tujuan penelitian berupa mentipekan hierarki permukiman tradisional. Dilanjutkan dengan mengumpulkan data melalui *database* pengindeksan Scopus dan Google Scholar. Data tersebut dianalisis menggunakan VOSviewer dalam menentukan gap analisisnya. Selanjutnya Analisa dari hasil penelitian terdahulu dijabarkan dalam metrik untuk melihat dasar teori hierarki permukiman dari yang terbesar ke yang terkecil dalam penggunaannya di skala global, nasional, dan lokal. Analisa tersebut menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dari teori-teori yang ada. Kemudian data dari teori tersebut diekstraksi sehingga memunculkan hierarki permukiman yang baru berdasarkan istilah lokal yang ada. Data tersebut ditipekan berdasarkan teori sebelumnya sehingga memunculkan suatu tipe yang baru.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Penjenjangan Permukiman di Indonesia Secara Umum

Permukiman disebutkan sebagai segala bentuk tempat tinggal manusia dari rumah terkecil hingga kota terbesar, dengan berbagai bentuk, bersifat permanen maupun sementara di pedesaan dan perkotaan, maupun yang tersebar dan diaglomerasi dalam mengejar tujuan hidup (Živkovi, 2019). Habraken (1983) mendefinisikan “*place*” sebagai tempat penghuni tinggal yang mana wujud lingkungan permukiman merupakan hasil kesepakatan sosial, bukan merupakan produk orang per orang. Trancik (1986) juga mengatakan sebuah tempat (*place*) memiliki karakteristiknya tersendiri seperti yang disampaikan Doxiadis (1968) bahwa terdapat dua elemen dalam pembentukan permukiman yaitu adanya wadah (*container*) dan isi (*content*).

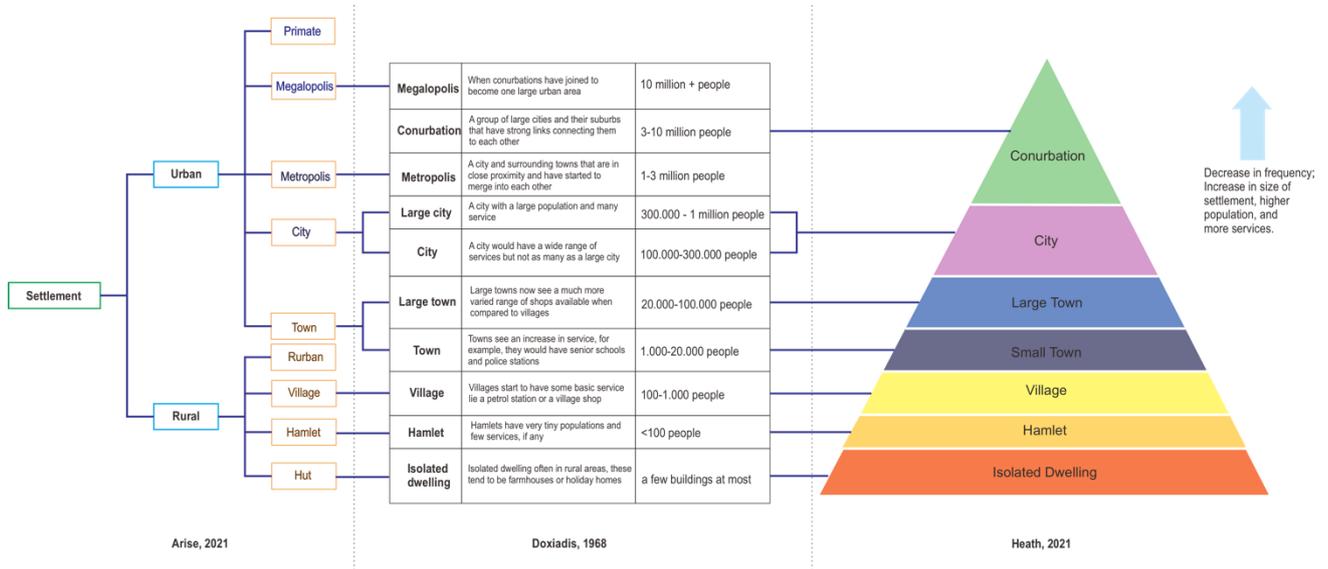
Heat (2021) dan BBC (2021) menyebutkan bahwa permukiman merupakan tempat tinggal orang pada sebuah pemukiman terkecil yaitu satu rumah di daerah terpencil atau yang besar berada di kota besar (kota dengan lebih dari 10 juta penduduk). Selain itu terdapat juga situs sebagai lokasi pemukiman di bumi yang memiliki karakteristik fisik lanskap. Terapat dua pembagian wilayah dalam istilah geografi, yaitu area *urban* (perkotaan) dan *area rural* (pedesaan).

Area urban merupakan area terbangun di wilayah kota mana pun dengan populasi 10.000 orang atau lebih. Sedangkan disisi lain disebut area *rural* yang berarti di luar daerah perkotaan yang terdapat lahan pertanian, hutan, gurun atau sabana tergantung keberadaannya. Menyimpulkan pendapat dari Sutardjo Kartohadikusumo dan Bintarto, suatu Desa adalah kesatuan hukum masyarakat tinggal yang mengadakan pemerintahan sendiri sebagai perwujudan wilayah yang muncul akibat unsur-unsur sosial, ekonomi, politik, dan kultural serta hubungan timbal baliknya dengan daerah di sekitarnya (Nailufar, 2020). Lebih lanjut pemukiman pedesaan diartikan sebagai tempat bermukim orang yang terlibat dalam kegiatan utama seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, atau perikanan. Dalam permukiman pedesaan terdapat kumpulan rumah-rumah yang terbentuk tidak direncanakan namun memiliki ikatan sosial yang kuat, sehingga tercipta morfologi fisik dan morfologi sosial.

Teori hierarki permukiman sudah dipakai jauh sebelumnya dengan istilah *urban* dan *rural* (perkotaan dan pedesaan) serta penamaan lain dalam konteks istilah lokal. Penjenjangan tersebut dimulai dari ukuran dari permukiman dan jumlah populasi penduduk. Seperti yang disampaikan oleh Doxiadic (1968), terdapat lima kriteria untuk membedakan antara pemukiman pedesaan dan pemukiman perkotaan, yaitu morfologi (struktur fisik), fungsi (primer, sekunder, tersier) pekerjaan, selanjutnya demografi (kepadatan penduduk tinggi atau rendah), selanjutnya ciri-ciri budaya, dan terakhir yaitu infrastruktur.

Dalam hierarki tersebut tentunya terdapat bermacam-macam teori yang berkembang, hierarki tersebut didasarkan dari pembagian kriteria yang disebutkan di atas, selanjutnya juga muncul istilah-istilah atau penamaan berdasarkan jumlah populasi yang semakin bertambah. Sebut saja istilah *primate city* yang dikenalkan oleh Mark Jefferson pada tahun 1939, mungkin istilah tersebut jika dilihat dari

populasi yang sekarang berbeda dengan populasi yang disampaikan sebelumnya, atau bisa saja permukiman yang tergolong ke dalam *primate city* tersebut sudah berbeda sudut pandang dalam mengategorikannya. Selain itu juga ada istilah *Ecumenopolis* yang muncul dalam tulisan Doxiadis pada tahun 1970 yang diartikan sebagai teoritis yang membayangkan seluruh wilayah didunia merupakan area perkotaan yang digabungkan.



**Gambar 3.** Penyelarasan Hierarki Pemukiman  
Sumber: Analisis, 2021

Jika penjenjangan tersebut diurutkan dari jumlah populasi terkecil maka akan dimulai dari yang disebut permukiman yang terisolasi (*isolated dwelling/hat*), yang mana ini dikategorikan rumah yang terisolir dalam komunitas terkecil. Selanjutnya naik ke *hamlet*, atau sekelompok permukiman atau rumah penduduk yang disebut juga dengan dusun. Ketika populasi terus bertambah dan kumpulan dari dusun ini membentuk sebuah kelompok lain yang disebut dengan *village* atau desa. Semua area ini dikategorikan dalam *area rural* atau pedesaan. Sedangkan *area urban* atau perkotaan di jenjangkan dengan kepadatan penduduk yang terus bertambah, dimulai dari *town*, yang terbagi jadi *small town* dan *large town*, kemudian naik ke dalam kategori yang disebut *city* dan juga *large city* dan kategori terakhir disebut *conurbation*, jenjang ini juga dalam beberapa teori lain juga masih terus naik dan berkembang menjadi *metropolis*, *megalopolis* dan *primate city*. Yang menarik semua istilah tersebut jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia tetap dikategorikan sebagai “kota”, walau dalam artian tersebut berbeda berdasarkan jumlah populasinya.

Dalam tatanan masyarakat Indonesia hierarki tersebut juga didasarkan dari populasi dan keberadaan masyarakat, semua itu diatur dalam undang-undang (UU No. 23 Th. 2014; UU No. 43 Th. 2008; UU No. 6 Th. 2014). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang bagaimana pemerintah mengatur hierarki pemerintahan daerah, berikut dengan aturan tentang otonomi daerah yang mengatur istilah atau penamaan lokal dalam hierarki pembagian wilayah tersebut. Hal ini tentu sejalan dengan keberagaman kebudayaan yang ada, yang sangat majemuk dan begitu indah. Namun yang menjadi perdebatan ketika istilah lokal tersebut berbeda artian dan tingkatan walau istilah yang digunakan sama. Sebut saja istilah kampung, di beberapa daerah itu merujuk ke dalam hierarki setingkat desa, namun dalam wilayah lain, kampung dikategorikan sebagai wilayah setingkat dusun atau dukuh. Istilah ini perlu di seajarkan agar tipologi hierarki tersebut bisa digunakan tanpa terjadi konflik dalam penyebutan.

Beranjak dari hal yang terkecil dengan sebutan unit lingkungan atau *neighborhood unit concept* (NUC), ini merupakan model desain perumahan yang dipopulerkan oleh Clarence A. Perry pada tahun 1929 untuk populasi lingkungan berkisar 5.000–9.000 penduduk, dengan model ini, Perry mengharapkan terjadi interaksi sosial dan kohesi di antara warga yang tinggal di lingkungan yang tersebut (Lawhon, 2009). Dalam pembagian wilayah administratif di Indonesia, terdapat hierarki yang dimulai dari unit terkecil (tingkat VI) berupa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), dulu ada juga Rukun Kampung (RK). Kemudian di atasnya ada Dusun (tingkat V) dan dalam bahasa lokal juga disebut bermacam-macam seperti *Jorong*, *Korong*, *Kampung*, *Banjar*, dan istilah lainnya. Selanjutnya tingkat IV disebut Desa atau kelurahan beserta istilah lokal yang sudah disebutkan sebelumnya, dilanjutkan pada tingkat III yaitu Kecamatan, dengan istilah *Kapanewon* dan *Kemantren* di Yogyakarta serta Distrik di Papua dan Papua Barat. Pada level tingkat II ada Kabupaten dan Kota dan Tingkat I ada Provinsi, Daerah Khusus dan Daerah Istimewa. Penggunaan nama “Daerah Tingkat” dengan penyebutan levelnya sudah tidak lagi digunakan, namun ini kita pakai sementara untuk mengategorikan hierarki yang ada.

**Tabel 1.** Penyelarasan Hierarki Permukiman di Indonesia

	Doxiadis, 1968	Heath, 2021	Teori Global		Nasional				
			Arise, 2021; BBC, 2021	Population (Jiwa)	Keterangan	(UU No. 23 Th. 2014; UU No. 43 Th. 2008; UU No. 6 Th. 2014)	Nama	Istilah Khusus	Ukuran
U r b a n	Ecumenopolis		Primate City	> 10 Juta	Tokyo - Osaka				
	Megalopolis		Megalopolis	3-10 Juta	Jabodetabek				
	Conurbation	Conurbation	Conurbation	1-3 Juta	Jakarta	Tingkat I	Daerah Khusus Daerah Istimewa		Beberapa Kabupaten /Kota
	Metropolis		Metropolis	300.000 - 1 Juta	Yogyakarta				
	Large city		Large city	100.000-300.000	Pekanbaru				
	City	City	City						
R u r a l	Large town	Large town	Large town	20.000-100.000	Dumai		Kota Madya		
	Town	Small town	Town	1.000-20.000	Taluk Kuantan (Kab. Kuantan Singingi)	Tingkat II	Kabupaten		Beberapa Kecamatan
			Rurban (Rural Urban)	500-10.000	Kec. Sail; Kapanewon Imogiri; Kemantren Pakualaman; Distrik Abepura	Tingkat III	Kecamatan	Kapanewon (DIY); Kemantren (DIY); Distrik (Papua)	Beberapa Desa / Kelurahan
					Mukim Lanteuba	Tingkat III-IV	Mukim (Aceh)		Beberapa Gampong
	Village	Village	Village	100-1.000	Kel. Tobek Godang (Pekanbaru); Gampong Peunayong (Aceh); Koto Sentajo (Riau)	Tingkat IV	Desa; Kelurahan	Koto; Gampong; Nagari; Kampung; Dusun; Pekon; Tiyuh; Lembang;	100-1.200 KK
	Hamlet	Hamlet	Hamlet	< 100	Dukuh Jeruk (DIY); Jorong Gurun (Sumbar);	Tingkat V	Dusun	Jorong; Korong; Rukun; Padukuhan; Banjar; Kampung; Lingkungan; Bori; Wanua; Kampong	Beberapa RW
	Isolated dwelling	Isolated dwelling	Hat	(Beberapa Rumah)	001 001	Komunitas lainnya	RW RT	RK; Kampung Adat; Kepenghuluan	3-10 RT 10-50 KK

Sumber: Analisis, 2021

RT merupakan pembagian wilayah di bawah RW. RT dan RW tidak termasuk dalam administratif pemerintahan, tapi tercipta berdasarkan musyawarah masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang disahkan oleh Desa atau Kelurahan. Ketua RT merupakan pimpinan kelompok unit ini yang dipilih oleh warga yang terdiri dari beberapa rumah dengan KK (kepala keluarga). Melihat sejarahnya, RT merupakan sistem kelompok militer yang dibawa oleh Jepang dengan sebutan *Tonarigumi* (隣組) yang memiliki arti "kerukunan tetangga" dalam upaya membentuk kelompok militer serta mobilisasi rakyat untuk perang di Indonesia. Selain itu ada unit lain disebut Rukun Kampung (RK) terdiri dari kampung dan populasi pinggir jalan yang mendiami ruang kota yang dibatasi oleh tiga jalan kota dan sungai (Guinness, 1997). Istilah RK sekarang sudah tidak digunakan. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Masyarakat di bawah Lurah atau Desa yang terbentuk dari hasil rembukan pengurus RT, sama halnya RW juga sebagai pelayan pemerintah dan masyarakat. Setiap RT terdiri dari 10 KK sampai 50 KK. Sedangkan RW terdiri dari 3-10 RT.

Pada jenjang berikutnya terdapat Dusun, yang mana dusun ini pengganti istilah *Padukuhan* atau *Pedukuhan* setelah masa Orde Baru, wilayah Dusun berkedudukan di bawah Desa atau Kelurahan, yang dipimpin oleh kepala Dusun. Istilah *Padukuhan* sekarang digunakan Kembali di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Unit berikutnya yaitu Desa atau Kelurahan yang sudah di Undang-undangkan dan tidak lagi termasuk dalam *neighborhood unit*. Unit di atas Desa disebut Kecamatan yang dipimpin oleh Camat, di Papua disebut Distrik, serta *Kemantren* dan *Kapanewon* di Yogyakarta (UU No. 23 Th. 2014). Pada tingkatan selanjutnya disebut Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh seorang Bupati atau Walikota. Sedangkan pembagian terakhir di bawah wilayah negara disebut Provinsi, istilah provinsi merupakan serapan kata "*provincie*" serapan bahasa Belanda dan bahasa latin.

### Local Wisdom Penjenjangan Permukiman Tradisional di Indonesia

Istilah merujuk pada bahasa, dan bahasa mencerminkan budaya. Istilah atau bahasa daerah menjadi sebuah tatanan dalam penjenjangan permukiman tradisional di Indonesia. Istilah-istilah tersebut digunakan sejak dahulunya dimulai dari masa kerajaan, kesultanan maupun keraton di Nusantara. Istilah tersebut juga bagian dari adopsi dari bahasa serapan yang dibawa, juga sebagai sebuah bahasa yang sama tingkatannya dalam menyebut sebuah permukiman. Istilah kampung paling banyak muncul dalam tatanan permukiman tradisional di Indonesia. Namun sejalan dengan perubahan paradigma dan kekuasaan serta peraturan dan undang-undang yang diterapkan, kata tersebut terus bertahan dengan hierarki yang juga ikut berubah sesuai dengan apa yang disepakati bersama.

**Tabel 2.** Istilah Lokal dalam Hirarki Permukiman di Indonesia

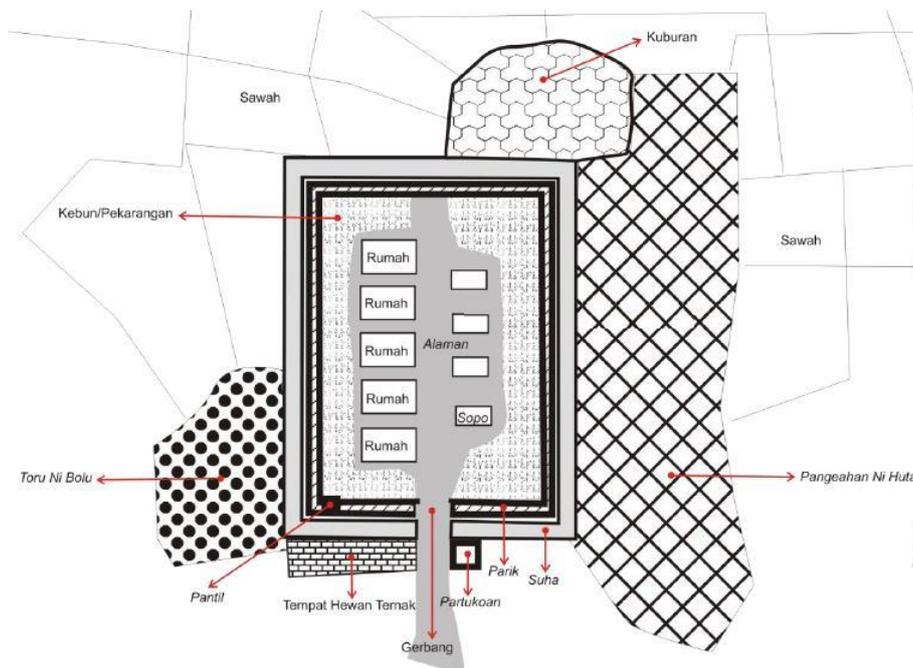
Jenjang	Nama	Istilah Lokal/Khusus (Masih Digunakan)	Istilah Lokal/Asing (Tidak Lagi Digunakan)
Tingkat I	Daerah Khusus	DKI Jakarta	Daerah Tingkat I (Dati I); Daerah Swatantra Tingkat I; Kotaraya; Keresidenan (Bisa Setingkat Provinsi)
	Daerah Istimewa Provinsi	DI Yogyakarta; Nanggro Aceh Darusalam	
Tingkat II	Kota Madya Kabupaten	Kota Administrasi (DKI)	Daerah Tingkat II (Dati II); Daerah Swatantra Tingkat II; Keresidenan (Bisa Setingkat Kabupaten); Kadipten
Tingkat III	Kecamatan	Kapanewon dan Kemantren (DIY); Distrik (Papua)	Daerah Swatantra Tingkat III; Kota Praja
Tingkat III-IV		Mukim (Aceh) / Luhak (Sumbar)	Kawedanan
Tingkat IV	Desa; Kelurahan	Koto (Riau); Gampong (Aceh); Nagari (Sumbar); Kampung (Riau/Lampung/ Kaltim/ Papua); Dusun (Bungo/Jambi/Sumsel); Pekon dan Tiyuh (Lampung); Lembang (Toraja); Negeri (Maluku); Banua (Kalsel); Desa Pekraman (Bali); Dusun Dati (Maluku); Hundulan / Kuria (Batak); Wtinua (Minahasa); Gaukang (Makasar); Matawa (Bugis)	-
Tingkat V	Dusun	Jorong (Sumbar); Korong (Padang Pariaman); Rukun (Jawa); Padukuhan (Jateng dan DIY); Banjar (Bali); Kampung (NTT); Kampong (Sulsel); Lingkungan (NTT dan Sulsel); Bori; Wanua (Sulsel); Kepenghuluan (Riau); Kampung Kota (DKI);	-
Komunitas lainnya	RW RT	Rukun Kampung; Kampung Adat;	

Sumber: Analisis, 2021

Kata 'kampung' berarti sebuah 'desa', di Jakarta terjemahan kampung sebagai 'desa perkotaan' atau sebagai lingkungan populer antara pembangunan besar, ruang terbuka, dan perumahan bertingkat di seluruh kota (McFarlane & Silver, 2017). Sedangkan kata Kampung dalam bahasa Melayu awalnya berarti "majemuk", kemudian berkembang dalam beberapa arti selama berabad-abad (Sullivan, 1986). Kata kampung tersebut juga berarti desa/pedesaan, kemudian berkembang sejalan dengan laju urbanisasi dan memiliki makna tambahan berupa permukiman perkotaan yang tidak terencana dengan konotasi yang terpinggirkan (Maliki dkk, 2015). Kampung juga dapat diartikan sebagai permukiman vernakular (Ellisa, 2016; Funo *et al.*, 2002; Obermayr, 2017). Shirleyana *et al.* (2018) mengatakan bahwasanya nama kampung berasal dari terjemahan harafiah (*toponim*) dari pendudukan penduduk kampung. Penduduk kota menggunakan istilah pulang atau balik kampung dengan nuansa nostalgia yang berarti tindakan kembali ke desa asal mereka, menunjukkan sejarah migrasi kota dan ikatan dengan desa pedesaan (Budianta, 2019).

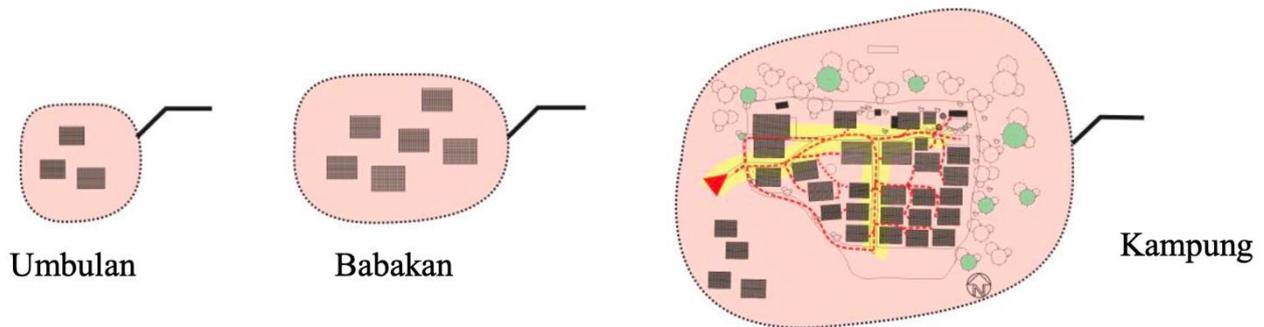
Kampung dapat dikategorikan sebagai sebuah desa. Kampung secara administratif merupakan istilah lain untuk desa atau kelurahan yang merupakan pembagian administratif daerah yang lebih kecil di bawah kecamatan/mukim/distrik/banua (benua). Kata kampung juga merujuk bahasa Portugis yang disebut “campo”, yang berarti tempat perkemahan. Kata *kompong* juga ditemukan di Kamboja yaitu sebuah distrik yang juga dipakai sebagai nama provinsi.

Nugroho (2009) mengatakan *kampung* dalam bahasa Minangkabau berkaitan dengan kehidupan yang sarat dan konsisten akan penerapan nilai-nilai tradisional. Sedangkan dalam bahasa batak kampung disebut *huta*, sebagai tempat tinggal dari satu moyang berdasarkan keturunan dan perkawinan. Istilah kampung dalam bahasa Aceh disebut *Gampong* yang berarti sebuah desa. *Gampong* terbentuk dari *jurong* (*lorong*), kumpulan rumah (*tumpok*) dan *ujung gampong* (*ujung*). Lebih lanjut yang dikatakan *gampong* adalah unit teritorial yang menggambarkan pola pemukiman dan organisasi sosial yang berkembang berdasarkan konteks ruang dan waktu terdiri dari kelompok individu. Pada masa Kesultanan Aceh, *gampong* merupakan kelompok hunian dengan adanya surau atau *meunasah* (Mahmuddin, 2016).



**Gambar 4.** Tipologi Pola Permukiman Tradisional Batak (*huta*)  
Sumber: Setiawan, 2010

Sebuah desa merupakan kelompok unit permukiman kecil yang disebut Kampung di Banten dan Jawa Barat, atau Dusun di Yogyakarta, Banjar di Bali, *Jorong* di Sumatra Barat maupun *Pekon*, *Tiuh* atau *Peratin* di Lampung. Dalam permukiman adat Sunda (Jawa Barat), *kampung* berawal dari dua sampai tiga rumah yang disebut *umbulan*, kemudian membentuk suatu *babakan* yang terdiri dari lima atau enam rumah. Keseluruhan permukiman ini disebut kampung yang terdapat puluhan rumah, adanya ruang terbuka, rumah ibadah, lumbung padi, kandang ternak, perkebunan dan persawahan serta sarana fisik yang ada di sekelilingnya (Kustianingrum *et al.*, 2013).



**Gambar 5.** Pola Pembentukan Kampung Adat di Jawa Barat

Sumber: Kustianingrum *et al.*, 2013

Selanjutnya penggunaan istilah lokal dalam keberadaan desa tersebut muncul dengan adanya otonomi daerah. Istilah desa bisa diganti sesuai dengan lokalitas setempat, misalnya di *Nagari* di Sumatra Barat, di Aceh disebut *Gampong* yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di Papua, Kutai Barat, dan Kalimantan Timur tetap menggunakan istilah Kampung. Di Bali ada dua bentuk desa, yaitu desa dinas (desa jasa) dan desa adat (desa budaya). Pada pemukiman tradisional di Bali, sebuah desa terbentuk dengan adanya *banjar* yang terdiri dari pemukiman penduduk. Dalam pola pemukiman tersebut terdapat pola linear yang mengacu pada *kaja* (gunung) dan *kelot* (laut), kemudian juga ada unsur lain seperti adanya pura, *bale*, pasar, *wantilan*, perkuburan dan lainnya. Sedangkan istilah Lembang di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara serta *kalurahan* digunakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, istilah dan institusi di desa tersebut sesuai dengan nama dan karakteristik adat istiadat pada wilayah tersebut.



**Gambar 6.** Pola Linear (kiri) dan Pola Kombinasi (kanan) Perumahan Tradisional Bali

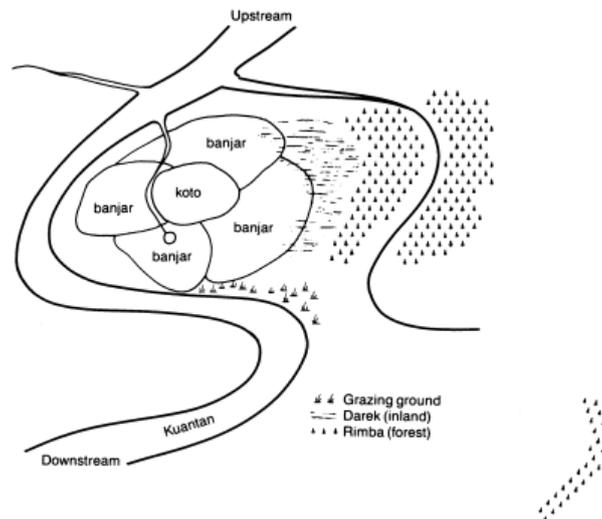
Sumber: Budiharjo dalam Mahendra, 2019

### **Koto sebagai Bagian dari Hierarki Permukiman Tradisional Melayu di Kuantan Singingi**

Koto adalah sebuah pemukiman pada bagian tinggi (bukit) aliran sungai Kuantan sebagai pusat negeri sekaligus pusat pemerintahan yang berkedudukan pemimpin-pemimpin adat seperti para datuk dan para penghulu maupun *urang godang* (orang besar). Koto merupakan sebutan khusus sekelompok pemukiman di sepanjang sungai dalam 'Rantau (nan) Kurang Oso Duo Puluah', disebut wilayah yang mempunyai sembilan belas *koto* (negeri) atau 19 (dua puluh kurang satu) koto (Tsuyoshi, 1997; Rahim, 2007). *Negeri/nagoghi/nagari* umumnya terdiri dari desa induk (koto) dengan desa atau dusun pembantu (*taratak; pagaran, banjar*, pemukiman di sekitarnya), dan terletak di dataran tinggi terkadang berjumlah hingga 600 orang (Holleman, 1981; Kato, 1989).

Pada setiap *koto* ditempatkan pimpinan yang bergelar *datuk* sebagai perwakilan pemerintahan (Schwartz, 1893). “Rantau diperintah raja, *luhak* diperintah orang besar, *nagori* diperintah penghulu, kampung diperintah urang tuo” (Rahim, 2007). Kelompok-kelompok ini pada umumnya menyebut satuan-satuan desa sebagai suku (di beberapa tempat istilah Koto digunakan) yang dikelompokkan di bawah *pasirah* (kepala pemerintahan suku pada masa Hindia Belanda di Sumatra), demikian pula di daerah lain digunakan untuk menyebut kelompok desa (Bettinger, 2015). Pada akhir masa penjajahan, *koto* merupakan pusat negeri dalam segala hal, sehingga karena supremasi inilah istilah “*koto*” lebih sering disebut daripada “negeri” ketika masyarakat Kuantan membicarakan adat (Kato, 1989).

Menurut Rahim (2007) sebuah *nagori* terdiri dari *koto*, kampung, dusun, dan *teratak*, merupakan sebuah nagari dapat terdiri dari beberapa *koto*, *koto* sebagai pusat pemukiman yang terdapat balai adat, masjid, lapangan dan rumah *godang* (*soko*). Proses membuka hutan oleh keluarga, kemudian membangun teratak, kemudian menjadi dusun dan kampung, menjadi *koto* dan menjadi *nagori* (Rahim, 1984/1985). Koto adalah pemukiman hampir secara eksklusif terdiri dari rumah-rumah, tetapi juga menampung dua lembaga terpenting di negeri yaitu balai adat dan masjid yang sering berdiri berdampingan untuk memperjelas *koto* merupakan pusat adat dan agama.



**Gambar 7.** Representasi Skema Pola Pemukiman di (Sungai) Kuantan  
Sumber: Kato, 1989

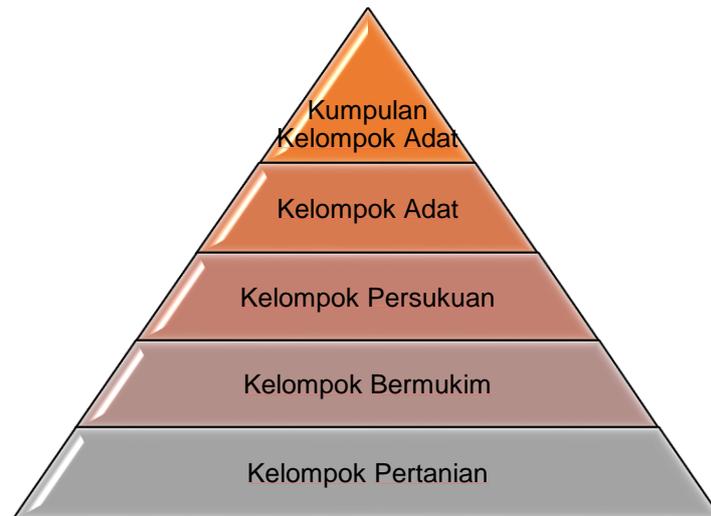
Pada awalnya Kenegerian Koto Sentajo (*Nagoghi*) merupakan wilayah kenegerian yang diibaratkan seperti sebuah kesatuan wilayah yang jika disetarakan dengan kondisi sekarang merupakan sebuah kecamatan. Koto merupakan sebagai ibukota wilayah tersebut, dikarenakan di wilayah *koto* terdapat unsur pemerintahan adat seperti adanya *Balai*, *Rumah Godang Suku* dan *Masjid* yang tidak terdapat di wilayah lain yang disebut *Banjar*. Pada wilayah banjar hanya terdapat permukiman, sedangkan pada satu Kenegerian tersebut terdiri dari adanya Banjar dan Koto, beserta perangkat wilayah lain seperti *Teratak* (atau wilayah perkebunan/peladangnya), hutan lindung atau hutan adat yang disebut *Kukok*, serta adanya *Pekandangan* yang difungsikan untuk beternak. Ketika terjadi perubahan paradigma dengan adanya aturan dan bersatunya wilayah di Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah-wilayah adat ini ikut berubah penamaan, dan penyeteraan dilakukan berdasarkan hirarki permukiman yang diatur oleh undang-undang. Kenegerian Sentajo menjadi sebuah Kecamatan, dan *koto* beserta *banjar* menjadi sebuah Desa, walau jika kita melihat dari awal dan sejarah proses terbentuknya *koto* beserta fungsi yang ada didalamnya, *koto* merupakan sebagai pusat atau ibu kota dalam sebuah kenegerian tersebut, yang mana hierarkinya lebih tinggi dari banjar atau desa, namun tidak melebihi sebuah *Kenegerian* atau Kecamatan.

#### 4. Kesimpulan

Pengelompokan penjenjangan permukiman di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang yang mengatur pembagian wilayah permukiman. Dalam organisasi penjenjangan tersebut terdapat tempat bermukim yang juga bisa dikategorikan sebagai sebuah wilayah permukiman. Pada level pemerintahan yang secara legal, tentunya berbeda dengan level permukiman secara tradisional. Pucuk pimpinan pemerintahan yang membawahi suatu wilayah administratif juga sebagai pimpinan wilayah permukiman. Jenjang permukiman tersebut sebagai sebuah kontrol dan upaya penyeragaman untuk memudahkan mengorganisir upaya memberikan perintah dan pelayanan dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Terdapat 6 (enam) tingkatan pemerintahan yang didalamnya juga terdapat wilayah permukiman, yaitu tingkatan pertama (Provinsi), tingkatan kedua (Kabupaten/Kota), tingkatan ketiga (Kecamatan), tingkatan keempat (Desa), tingkatan kelima (Dusun), dan tingkatan keenam (Unit Ketetangaan).

Dalam hierarki permukiman tradisional, level tersebut tidak bisa disamakan dan disejajarkan berdasarkan tingkatan I-VI di atas. Permukiman tradisional terbentuk karena adanya keseragaman sosial dan kebudayaan yang mengikat antara masyarakat yang satu dan lainnya. Jenjang permukiman tradisional ditekan sebagai bagian dari penjenjangan dari unit terkecil.

1. Tipe pertama disebut *kelompok pertanian*, pada kelompok ini permukiman yang dibentuk untuk mencari nafkah dengan keluarga inti dan keluarga besar. Pada beberapa tempat disebut dengan *teratak* atau *peladangan*.
2. Tipe kedua pada level kedua disebut *kelompok bermukim*; yang mana masyarakat berkelompok sebagai upaya menjaga tradisi dan kebudayaan dalam satu kekerabatan. Di beberapa daerah kelompok bermukim ini disebut Dusun, Dukuh atau Banjar.
3. Kemudian tipe ketiga berupa kumpulan dari banjar atau dusun ini membentuk sebuah kampung, kampung juga dipimpin oleh seorang ketua kampung atau kepala kampung yang ditekan sebagai *kumpulan kelompok bermukim (kelompok suku)*. Kumpulan kelompok ini didasarkan pada satu garis keturunan yang lebih jauh, kadang kala disebut Suku ada pula disebut Marga.
4. Tipe keempat merupakan *kumpulan kelompok suku (kelompok adat)*, kumpulan dari kampung atau persukuan tadi membentuk hierarki yang lebih tinggi, dipimpin oleh orang yang ditunjuk dari pimpinan kelompok masyarakat persukuan tadi.
5. Sedangkan Tipe berikutnya di atas kampung jenjang tersebut mulai samar, karena tidak banyak daerah yang memiliki hierarki yang di atas kampung. Beberapa wilayah saja di Aceh yang disebut *Mukim* dan *Luhak* di Sumatera Barat yang masih memiliki hierarki ini pada tingkatan ini. Hierarki di atas ini sudah tidak lagi ditemukan, karena pada dasarnya hierarki permukiman tradisional tersebut berdasarkan sebuah kerajaan yang memiliki wilayah adat yang mencakup seluruh tipe permukiman tadi.



**Gambar 8.** Hierarki Pemukiman Tradisional  
Sumber: Analisa Pribadi, 2021

## 6. Daftar Acuan

- Amabi, D. A., & Dima, T. K. (2020). Pengaruh Ritual Adat Terhadap Tata Ruang Permukiman Tradisional Suku Matabesi Di Kabupaten Belu, *Gewang*, 2(1), 9-15.
- Anonim (2021, December 21). *Settlement characteristics*, BBCOnline. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zyyvtyc/revision/4>
- Arise, L. (2021, February 22). *Introduction to Settlement Geography*, Lotus Arise. <https://lotusarise.com/introduction-to-settlement-geography-upsc/>
- Arise, L. (2021, July 28). *Hierarchy of Urban Settlements*, Lotus Arise. <https://lotusarise.com/hierarchy-of-urban-settlements-upsc/>
- Barliana, S. M. (2004). Tradisionalitas dan Modernitas Tipologi Arsitektur Masjid. *Dimensi*, 32(2), 110-118.
- Bettinger, K. A. (2015). The Fight over the Forest: The State, Rural Communities, and Customary Law in Indonesia. *Worldviews*, 19(2), 123-143. <http://www.jstor.org/stable/43809527>
- Budianta, M. (2019). Smart kampung: doing cultural studies in the Global South, *Communication and Critical. Cultural Studies*, 16(3), 241-256, DOI:10.1080/14791420.2019.1650194
- Dijkstra, L., Florczyk, A. J., Freire, S., Kemper, T., Melchiorri, M., Pesaresi, M., & Schiavina, M. (2021). Applying the Degree of Urbanisation to the globe: A new harmonised definition reveals a different picture of global urbanization. *Journal of Urban Economics*, 125, 103312, <https://doi.org/10.1016/j.jue.2020.103312>.
- Doxiadis, C. (1968). *Ekistics: An Introduction to the Science of Human Settlements*, Hutchinson, London.
- Doxiadis, C. A. (1970). Ekistics, the Science of Human Settlements. *Science*, 170(3956), 393-404. <http://www.jstor.org/stable/1729412>
- Ellisa, E. (2016). Coping with crowding in high-density kampung housing of Jakarta. *International Journal of Architectural Research*, 10(1), 195-212.
- Fairuzahira, S., Rukmi, W. I., & Sari, K. E. (2020). Elemen Pembentuk Permukiman Tradisional Kampung Naga. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 12(1), 29-37.
- Faisal, G., Wihardiyanto, D., & Roychansyah, M. (2014). Tipologi Pintu Rumah Tradisional Dusun Pucung, Situs Manusia Purba Sangiran. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 1(2), 65-73.
- Farizkha, I. A., Alfiah, R., Listyawati, R. N., & AjiR.S. (2019). Understanding the Characteristics of "Ekistics" Elements in Determining Factors of Urban Settlement Growth. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 328, 012065
- Francescatto, G. (1994). Type and the Possibility of an Architecture Scholarship, Ordering Space, Types in *Architectural and Design*, in Karen A. Franck, Lynda H. Schneekloth (Eds). Van Nostrand Reinhold, New York.
- Funo, S., Yamamoto, N., & Silas, J. (2002). Typology of kampung houses and their transformation process. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 1(2), 193-200.
- Guinness, P. (2009). *Kampung, Islam and State in Urban Java*, NUS Press.

- Guinness, P. (1997). Constructing and Contesting the Kampung, *Canberra Anthropology*, 20(1-2), 109-124, DOI:10.1080/03149099709508385
- Habraken, N. J. (1983). *Transformation of the Site*. Cambridge, A Water Press.
- Habraken, N. J. (1998). *The Structure of the Ordinary*. Cambridge, MIT Press.
- Hardy, I., Maromon, R., & Amabi, D. (2021). Tipologi Pengembangan Rumah Subsidi oleh Penghuni di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT). *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 8(1), 1-15. <http://dx.doi.org/10.26418/lantang.v8i1.43062>
- Hariyati, R. T. S. (2010). Mengenal Systematic Review Theory dan Studi Kasus. *J. Keperawatan Indonesia*, 13(2), 124-132.
- Heath, S. (2021, December 21). *Settlements*, TheGeograferOnline.<https://www.thegeographeronline.net/settlements.html>
- Holleman, J. F. (1981). Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law (Ed) Selections from Het Adatrecht Van Nederlandsch-Indi, (Volume I, 1918; Volume II, 1931), Springer Science Business Media, B.V.
- Kato, T. (1989). Different Fields, Similar Locusts: Adat Communities and the Village Law of 1979 in Indonesia. *Indonesia*, 47, 89-114. <https://doi.org/10.2307/3351077>
- Kustianingrum, D., Sonjaya, O. & Ginanjar, Y. (2013). Kajian Pola Penataan Massa dan Tipologi Bentuk Bangunan Kampung Adat Dukuh di Garut, Jawa Barat. *Jurnal Reka Karsa*, 3(1), 1-13.
- Lawhon, L. L. (2009). The Neighborhood Unit: Physical Design or Physical Determinism? *Journal of Planning History*, 8(2), 111-132. <https://doi.org/10.1177/1538513208327072>
- Lusiana & Suryani, M. (2014). Metode SLR untuk Mengidentifikasi Isu-Isu dalam Software Engineering. *SATIN (Sains dan Teknol. Informasi)*, 3(1), 1-11. DOI: <https://doi.org/10.33372/stn.v3i1.347>
- Mahendra, I. M. A. (2019). Pola Tata Ruang Bali Sebagai Identitas Kawasan Perkotaan. *Vastuwidya*, 2(2), 9-15. <https://doi.org/10.47532/jiv.v2i2.84>
- Mahmuddin (2016). Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong. *AL-IJTIMA' I-International Journal of Government and Social Science*, 1(2), 26-41.
- Maliki, N. Z., Abdullah, A., & Bahauddin, A. (2015). Recalling the Transitional Space: City Home and Kampung Home. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 170, 605-12, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.062>
- McFarlane, C., & Silver, J. (2017). Navigating the city: Dialectics of everyday urbanism. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 42(3), 458-471.
- Moneo, R. (1979). Oppositions Summer on Typology. *Journal for Ideas and Criticism in Architecture* 13, 23-45.
- Muslim, F., Kumalawati, R., & Aristin, N. F. (2017). Kerentanan Bangunan Pemukiman Terhadap Banjir di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Jurnal Pendidikan Geografi*, 4(1), 1-7.
- Nailufar, N. N. (2020, January 9). Desa: Definisi dan Unsurnya, Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya>.
- Nugroho, A. C. (2009). Kampung Kota Sebagai Sebuah Titik Tolak dalam membentuk Urbanitas dan Ruang Kota Berkelanjutan. *Jurnal Rekayasa*, 13(3), 209-218.
- Obermayr, C. (2017), *Sustainable City Management*, Springer, Cham, <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-49418-0>
- Oktay, M. & Dincyurek, O. (2008). Interrogating Place and Identity: The Influences of Imported Cultures on Local Traditional Architecture of Cyprus in Traditional Dwellings and Settlements Review, *Journal of the International Association for the Study of Traditional Environments*, 20(1), 40-41.
- Pearson, A., White, H., Bath-Hextall, F., Salmond, S., Apostolo, J., & Kirkpatrick, P. (2015). A mixed-methods approach to systematic reviews. *International Journal of Evidence-Based Healthcare*, 13(3), 121-131. doi:10.1097/XEB.0000000000000052
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Lembaran RI Tahun 2008, Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran RI Tahun 2014, Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran RI Tahun 2014, Sekretariat Negara.
- Perry, C. (1998). *The Neighbourhood Unit*, Reprinted Routledge/Thoemmes
- Pineiro, S. L. (2021). One Typology for a Big Word: Office of Diversity, *Interiority*, 4(1), 95-116. <https://doi.org/10.7454/in.v4i1.111>
- Prajnawrdhi, T. A. & Yudiantini, N. M. (2017). *Tipologi Rumah Adat pada Desa Bali Aga: Studi Kasus Pada Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng*, Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali, Indonesia, 103-108.
- Rahim, A. M. (2007). Pemerintahan Adat Melayu Rantau Kuantan dan Kampar Kiri. in Heddy Shri Ahimsa-Putra (Eds.), *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*, (pp. 563-577) Adicitra Karya Nusa.
- Santoso, E. B., & Therik, L. V. (2016). Faktor Penentu Bertempat Tinggal Pada Kawasan Kumuh Di Kota Malang Berdasarkan Teori Doxiadis, *Tataloka*, 18(4), 261-273. <https://doi.org/10.14710/tataloka.18.4.261-273>

- Sasongko, I. (2005). Pembentukan Struktur Ruang Permukiman Berbasis Budaya. *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, 33(1), 1-8.
- Schwartz, H. E. F. (1892). *Nota Over den Politieken en Economische Toestand van het Landschap Kuwantan*, Abrecht & Rusche.
- Setiawan, T. (2010). Bentuk Adaptasi Lingkungan pada Permukiman Tradisional di Danau Toba. *Jurnal Berkala Arkeologi Sangkhakala*, 13(25), 145-153. <http://dx.doi.org/10.24832/bas.v13i25.196>
- Shirleyana., Hawken, S., & Sunindijo, R. Y. (2018). City of Kampung: risk and resilience in the urban communities of Surabaya, Indonesia. *International Journal of Building Pathology and Adaptation*, 36(5), 543-568. <https://doi.org/10.1108/IJBPA-02-2018-0025>
- Skirton, H., O'connor, A. & humphreys a. (2012) Nurses' competence in genetics: a mixed method systematic review. *Journal of Advanced Nursing* 68(11), 2387–2398.
- Sullivan, J. (1986). Kampung and State: The Role of Government in the Development of Urban Community in Yogyakarta. *Indonesia*, 41, 63–88. <https://doi.org/10.2307/3351036>
- Tobing, R. R. & Sakti, A. K. (2021). Identification of the Architectural Housing Form and the Existence of Ulos Communities in Hutaraja Village, Samosir, North Sumatra, Indonesia, *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.*, 903, 012007
- Trancik, R. (1986). *Finding Lost Space: Theories of Urban Design*. Van Nostrand Reinhold Company.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)*, 1(2), 63-77.
- Tsuyoshi, K. (1997). The Localization of Kuantan in Indonesia: From Minangkabau Frontier to a Riau Administrative District. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 153(4), 737–763. <http://www.jstor.org/stable/27865397>
- Van Eck, N. J. & Waltman, L. (2014). Visualizing Bibliometric Networks. In Y. Ding, R. Rousseau, & D. Wolfram (Eds.), *Measuring Scholarly Impact: Methods and practice* (pp. 285–320). Springer.
- Wang, N., Hailey, D. & Yu, P. (2011). Quality of Nursing Documentation and Approaches to its Evaluation: A Mixed-Method Systematic Review. *Journal of Advanced Nursing*, 67(9), 1858–1875. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05634.x>
- Živković J. (2019). Human Settlements and Climate Change. In: Leal Filho W., Azeiteiro U., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (Eds.), *Climate Action. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-71063-1\\_88-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-71063-1_88-1)